

Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Wiwik Anggraeni (222020100137)

Dosen Pembimbing:

Ilmi Usrotin Choiriyah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026

Pendahuluan

Tata Kelola Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen strategis untuk tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (UU No. 23/2014 & Permendagri No. 77/2020).

Kompleksitas BPKAD

BPKAD Kab. Sidoarjo mengelola keuangan 49 OPD dengan nilai anggaran Rp5,2 triliun (2024), membutuhkan sistem informasi yang efektif untuk akurasi dan ketepatan pelaporan.

Lahirnya SIKSDA

Pemkab Sidoarjo mengembangkan SIKSDA sejak 2017, platform terpadu yang mengintegrasikan perencanaan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.

Inovasi SIKSDA

Integrasi real-time Bank Jatim (2018), fitur non-tunai & paperless (2022), integrasi tanda tangan elektronik BSR E untuk SPM dan SP2D (2024), otomatisasi CaLK (2024)

Kendala: belum terintegrasinya SIKSDA dengan SIM BMD → duplikasi input 49 OPD, rekonsiliasi manual triwulan.

Pendahuluan

Tabel 1. Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	Target 2024	Capaian (%)
Persentase LKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase aset terdokumentasi legal	99,50%	99,60%	99,88%	100,04%	99,96%	100,08 %
Nilai SAKIP	82,3	82,3 (A)	84,23	84,86	84 (A)	101,02 %
Nilai IPP	3,99 (B)	4,03 (A-)	4,05 (A-)	4,05 (A-)	4,07 (A-)	99,50%
Nilai SKM	84,65	96,06	95,50	96,66	97,00	99,64%

(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024)

- Kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan capaian yang sangat baik secara garis besar (nilai SAKIP, LKPD, dan SKM tinggi).
- Namun, capaian tersebut lebih mencerminkan hasil akhir (output), belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas proses internal sistem.
- Masih terdapat potensi permasalahan tersembunyi (hidden issues) dalam operasional SIKSDA.
- Permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya SIKSDA dengan SIM BMD.
- Kondisi ini menyebabkan duplikasi input data, rekonsiliasi manual, dan potensi inkonsistensi data aset.
- Akibatnya, efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal meskipun capaian kinerja terlihat tinggi.

Penelitian Terdahulu

Irfianto & Utami (2013) — SIPKD Kab. Gresik

Efektivitas SIPKD berada pada kategori cukup efektif (66,8%). Kendala utama: keterbatasan kapasitas database dan kebutuhan peremajaan teknologi. Digitalisasi keuangan penting namun bergantung pada kesiapan infrastruktur.

Teken & Romarina (2024) — SIPD Kota Denpasar

Penerapan SIPD belum efektif — baru digunakan 2022, sistem belum stabil, masih mengandalkan SIPKD pendamping. Faktor: kurangnya integrasi, error aplikasi, respons lambat saat peak hours, minimnya pelatihan.

Firdaus & Cholik (2024) — SIPD Kota Bekasi

SIPD belum efektif karena akses sulit, fitur belum mencakup seluruh siklus keuangan, duplikasi pengerjaan antara SIPD dan sistem internal. Kerangka teori: UTAUT (ekspektasi kinerja, usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi).

Gap Penelitian

Belum ada penelitian yang menilai efektivitas SIKSDA di Kab. Sidoarjo. SIKSDA memiliki karakteristik unik: non-tunai, paperless, integrasi Bank Jatim, BSRé, dan otomatisasi CaLK. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan teori Duncan-Steers.

Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas implementasi SIKSDA dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi?

Tujuan Penelitian

01

Menganalisis efektivitas SIKSDA dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

02

Mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi SIKSDA.

Metode

Pendekatan	Kualitatif deskriptif
Teori	Efektivitas organisasi Duncan yang dikutip Steers, yang mencakup tiga dimensi: : (1) Pencapaian Tujuan (Goal Achievement), (2) Integrasi (Integration), dan (3) Adaptasi (Adaptation)
Lokasi Penelitian	BPKAD Kabupaten Sidoarjo
Informan Penelitian	Staf Akuntansi, , Pengolah Data Perbendaharaan, dan Pengelola Data Laporan Keuangan
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
Sumber Data	Primer: Wawancara mendalam, dan observasi Sekunder: LKjIP 2024, dokumentasi SIKSDA
Teknik Analisis Data	Model Miles & Huberman (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan)

Hasil dan Pembahasan

Dimensi 1: Pencapaian Tujuan (Goal Achievement)

Cakupan	Temuan	Pembahasan
a. Kurun Waktu Pencapaian	SIKSDA versi web (2020) mempercepat proses pelaporan secara signifikan. Data ditarik otomatis antarunit, mengurangi input manual.	Efisiensi waktu meningkat; mempercepat pengambilan keputusan pimpinan dan kepatuhan terhadap tenggat regulasi.
b. Penyusunan Target dan Realisasi Anggaran	SIKSDA memungkinkan pemantauan APBD secara real-time dari perencanaan RKA hingga realisasi; dashboard menampilkan deviasi anggaran.	Ketepatan perencanaan & pelaporan meningkat. Realisasi anggaran lebih akurat berbasis data.
c. Dasar Hukum	Seluruh modul disesuaikan dengan Permendagri No. 77/2020 dan PP No. 71/2010 (SAP). Tidak diperlukan SOP tambahan.	Aspek legalitas & kesesuaian regulasi terpenuhi. Sistem memiliki embedded compliance yang kuat.
d. Strategi Mencapai Tujuan	Pelatihan internal setiap ada pembaruan sistem/regulasi. Transfer knowledge antarpegawai secara informal.	Memperkuat kemampuan individu, meningkatkan efektivitas kerja dan akurasi pengelolaan keuangan.
e. Efisiensi dan Akurasi Data	Validasi otomatis menolak input tidak sesuai format/logika. Sumber data dapat ditelusuri & divalidasi dengan mudah.	Kesalahan input berkurang signifikan. LKPD sesuai SAP 100% selama 4 tahun berturut-turut (2021–2024).

Hasil dan Pembahasan

Dimensi 2: Integrasi (Integration)

Cakupan	Temuan	Pembahasan
a. Prosedur Kerja	Alur kerja sudah terotomatisasi sesuai aturan Kemendagri — dari RKA hingga pelaporan. Validasi otomatis di setiap tahap input.	Standardisasi prosedur komprehensif di seluruh unit BPKAD. Konsistensi terjaga otomatis, meminimalkan deviasi prosedural.
b. Analisis Perencanaan	<p>Terhubung dengan: Bank Jatim (pencairan real-time), Aplikasi Pajak Daerah, PPJ (pengadaan), BSRé (tanda tangan elektronik, 2024).</p> <p>SIKSDA belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIM BMD (pengelolaan aset). Duplikasi input oleh 49 OPD, rekonsiliasi manual setiap triwulan.</p>	<p>Mempercepat arus informasi antarunit & mendukung pengambilan keputusan fiskal yang lebih cepat dan berbasis data.</p> <p>Dimensi integrasi belum tercapai sempurna. Potensi inkonsistensi data antara catatan keuangan dan aset daerah.</p>

Tabel 2. Integrasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Sistem	Fungsi Utama	Volume Data	Status Integrasi dengan SIKSDA
1	SIKSDA	Pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, perbendaharaan, akuntansi)	49 OPD, Anggaran Rp 5,2 T	- (sistem utama)
2	Bank Jatim	Pencairan dana real-time	Seluruh transaksi pencairan	Terintegrasi penuh (2018)
3	Sistem Pajak Daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Data penerimaan pajak	Terintegrasi
4	Aplikasi Pengadaan (LPSE)	Pengadaan barang/jasa	Data kontrak dan pengadaan	Terintegrasi
5	BSRÉ	Tanda tangan elektronik	SPM dan SP2D	Terintegrasi (2024)
6	SIM BMD	Pengelolaan aset daerah	483.426 unit aset tetap, 2.653 bidang tanah	Belum terintegrasi

(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Dimensi 3: Adaptasi (Adaptation)

Cakupan	Temuan	Pembahasan
a. Sarana dan Prasarana	Sistem berbasis web bergantung pada stabilitas internet. Server pernah terkena hack. Backup data dilakukan harian (daily backup) otomatis.	Kesadaran adaptif dalam menjaga keberlanjutan operasional. Risiko kehilangan data dapat diminimalisir. Backup harian meminimalisir risiko kehilangan data. Keamanan siber menjadi perhatian serius.
b. Monitoring & Evaluasi Program	Evaluasi internal berkala melalui rapat koordinasi formal & komunikasi informal antarunit. Temuan dijadikan dasar penyempurnaan sistem.	Mekanisme evaluatif yang adaptif menjaga relevansi dan kinerja sistem secara berkelanjutan.
c. Kendala dan Upaya Penanganan	Human error, keterlambatan dokumen OPD, perlambatan sistem saat peak season, belum terintegrasinya SIM BMD, ancaman siber.	Bimtek intensif, rekonsiliasi berkala, peningkatan infrastruktur, percepatan integrasi. Respons adaptif dan berkelanjutan.

Temuan Penting Penelitian

SIKSDA Efektif Secara Keseluruhan

SIKSDA yang dikembangkan sejak 2017 hingga 2024 terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. LKPD sesuai SAP 100% dari 49 OPD selama 4 tahun berturut-turut, dan nilai SAKIP meningkat dari 82,3 (2021) menjadi 84,86 (2024).

Gap Antara Capaian Output dan Efektivitas Proses

Capaian kinerja yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas proses internal. Masih terdapat hidden issues: perlambatan sistem saat peak season, human error pada OPD yang mengalami pergantian pegawai, dan inkonsistensi data akibat belum terintegrasinya SIM BMD.

Integrasi SIM BMD Menjadi Bottleneck Utama

Belum terintegrasinya SIKSDA dengan SIM BMD merupakan kendala paling krusial. Duplikasi input oleh 49 OPD dan rekonsiliasi manual triwulan untuk 483.426 unit aset tetap mengurangi efisiensi dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi data antara catatan keuangan dan aset daerah.

SIKSDA sebagai Best Practice Nasional

Dibandingkan dengan SIPD di Kota Denpasar dan Kota Bekasi yang masih menghadapi berbagai kendala integrasi dan adaptasi, SIKSDA dapat dikategorikan sebagai PRAKTIK BAIK (Best Practice) dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah yang efektif dan adaptif di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan praktik pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Manfaat Teoritis

■ Pengembangan Teori Efektivitas

Menguji dan memperkaya teori efektivitas organisasi Duncan (Steers) dalam konteks implementasi sistem informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

■ Kontribusi Keilmuan Administrasi Publik

Memberikan referensi empiris tentang hubungan antara digitalisasi keuangan daerah dengan peningkatan kinerja birokrasi publik berbasis bukti lapangan.

■ Referensi Research Gap

Mengisi kekosongan penelitian tentang efektivitas SIKSDA dan sistem informasi keuangan yang mencakup aspek integrasi dengan sistem pengelolaan aset (SIM BMD).

Manfaat Praktis

■ Bagi BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Memberikan pemetaan kendala operasional SIKSDA secara komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis, khususnya percepatan integrasi SIKSDA–SIM BMD.

■ Bagi Pemerintah Daerah Lain

Menjadi pembelajaran dan referensi best practice bagi pemerintah daerah lain yang sedang atau akan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah serupa.

■ Bagi Pengembang Kebijakan Nasional

Memberikan masukan empiris kepada Kemendagri dalam penyempurnaan kebijakan SIPD dan standar integrasi sistem informasi keuangan daerah secara nasional.

Kesimpulan

PENCAPAIAN TUJUAN

SIKSDA terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan. Seluruh 49 OPD menghasilkan LKPD sesuai SAP (100%), nilai SAKIP terus meningkat (82,3 → 84,86), didukung pemantauan anggaran real-time dan pelatihan pengguna.

INTEGRASI

Integrasi dengan Bank Jatim, BSR E, PPJ, dan aplikasi pajak daerah berjalan baik. Namun integrasi dengan SIM BMD belum optimal — masih ada duplikasi input dan rekonsiliasi manual triwulan. Ini menjadi prioritas pengembangan ke depan.

ADAPTASI

BPKAD menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik melalui pembaruan sistem berkala (Non-tunai 2022, BSR E & CaLK otomatis 2024), pelatihan rutin, backup data harian, dan evaluasi internal responsif terhadap dinamika regulasi & kebutuhan pengguna.

SIKSDA dapat dikategorikan sebagai PRAKTIK BAIK (Best Practice) dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah yang efektif dan adaptif di Indonesia.

Referensi

- [1] M. Hasyim, "Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional," *Mimb. Keadilan*, vol. 14, no. 1, pp. 95–106, 2021, doi: 10.30996/mk.v14i1.4665.
- [2] L. T. J. Fitria Wahida, Animah, "Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram," *Akbis Media Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, p. 20, 2022, doi: 10.35308/akbis.v6i1.5265.
- [3] B. P. Manohara, I. Nurdin, and M. B. Z. Tjenreng, "Optimasi TIK di Sektor Keuangan dan Ekonomi, Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi," *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 232–239, 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i1.1015.
- [4] N. H. Fitri Zahwatul Aulia, "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Ilmu dan Ris. ...*, 2024, [Online]. Available: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5821%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5821/5866>
- [5] C. M. J. Gultom and S. N. Harahap, "Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah," *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 300–313, 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1846.
- [6] E. I. Rahayu, "EFEKTIVITAS KINERJA DIVISI STRATEGIC SOURCING BARANG INFORMATION AND TECHNOLOGY (IT), INFORMATION AND SYSTEM (IS) DAN PERALATAN PERKASAN BANK INDONESIA DALAM MENERAPKAN WORK FROM HOME (WFH) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021," *Galang Tanjung*, vol. 2019, no. 2504, pp. 1–9, 2022.
- [7] H. Lathifah, A. Frinaldi, and N. Eka Putri, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik," *J. Prof.*, vol. 11, no. 2, pp. 585–592, 2024.
- [8] Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, and Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka," *J. Projemen UNIPA*, vol. 9, no. 2, pp. 51–70, 2023, doi: 10.59603/projemen.v9i2.44.
- [9] T. Taufiqurrohman and I. Puspita, "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Bimbingan Teknis Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak," *J. Stud. Akunt. dan Bisnis (The Indones. J. Manag. Accounting)*, vol. 8, no. 2, p. 155, 2020, doi: 10.55171/jsab.v8i2.594.
- [10] D. M. Rosyidah, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi)," *J. Multidisiplin West Sci.*, vol. 2, no. 08, pp. 615–635, 2023, doi: 10.58812/jmws.v2i08.566.

